

No. 154 November-Desember 2018

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

LAPORAN KHUSUS

FESTIVAL FORUM KAWASAN TIMUR
INDONESIA 2018

*Lokal dan
Berbetanjutan*

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**
Database & Sirkulasi **INDINA ISBACH**
Design & Layout
Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI Instagram @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

Daftar Isi

BaKTI*News*

November - Desember 2018

No. **154**

- 1** Laporan Khusus Festival Frorum KTI VIII
**Festival Praktik Cerdas Lokal
untuk Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia**
- 15** RPJMN 2019 - 2024 :
**Perspektif Kepentingan
Pembangunan KTI**
Oleh **A. M. SALLATU**
- 19** **Leave No She Behind**
Involving Women in Policy-making
and Peacemaking
Oleh **AYUNDA NURVITASARI**
- 21** **Pentingnya Kebijakan Publik
Berbasis Bukti**
Oleh **RIO AFIFUDDIN**
- 25** **Narasi Pertanian Organik
di Distrik Akat**
Oleh **PETRUS PIT SUPARDI**
- 29** **Melanjutkan Praktik yang Baik**
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 33** **Mereformasi Sekolah dan Komite
Sekolah Serta Meningkatkan Tata
Kelola Sekolah**
Bagian II-Selesai
Oleh **SUHARTO**
- 37** **Literasi Untuk Kesejahteraan**
Oleh **IRSAN**
- 40** Kegiatan BaKTI
- 41** Info Buku

■ Foto Cover : **Farid Wajdi / Yayasan BaKTI**

Yayasan BaKTI

mengucapkan

*Selamat
Hari Natal
dan
Tahun Baru
2019*



Festival Praktik Cerdas Lokal untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Festival Forum Kawasan Timur Indonesia kembali digelar pada 24-25 Oktober 2018 di Four Points Hotel by Sheraton Makassar. Perhelatan ini mengangkat beragam praktik cerdas dan inspirasi yang merupakan inisiatif lokal yang dinilai mengangkat unsur-unsur mendasar yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan.

Kelima Praktik Cerdas yang diangkat BaKTI pada tahun ini berasal dari Kalaodi - Tidore, Mollo Utara, Manado, Makassar, Papua dan Papua Barat. Selain itu BaKTI juga mengangkat sembilan tokoh inspiratif yang tengah mengerjakan beragam inisiatif keren dari Tolikara, Makassar, Parepare, Maros, dan Jakarta.





Acara pembukaan Festival Forum KTI ke VIII yang ditandai dengan tabuhan gendang (atas), Sambutan Ketua Pokja Forum KTI, Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS (kiri), dan sambutan Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, M. Yusran Laitupa (kanan). Foto : Farid Wajdi / Yayasan BaKTI

“Keberhasilan-keberhasilan yang ditampilkan oleh praktisi praktik cerdas dan inspirator patut dicontoh atau menjadi inspirasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia yang juga menghadapi tantangan yang sama. Dengan belajar dari kegiatan lain yang telah berhasil dilakukan, masyarakat tidak lagi mulai dari nol dan peluang untuk berhasilnya jauh lebih besar”, kata Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS, Ketua Pokja Festival Forum Kawasan Timur Indonesia.

Antusiasme terhadap Festival Forum Kawasan Timur Indonesia semakin hari semakin besar. Sebanyak 918 peserta membanjiri acara yang diadakan sekali dalam dua tahun ini. Peserta Festival Forum Kawasan Timur Indonesia tidak hanya berasal dari Kota Makassar atau Sulawesi saja, melainkan juga dari Papua dan Papua Barat, Nusa Tenggara, Maluku, Aceh, Riau, dan tentu saja dari Jakarta.

Dalam Festival Forum Kawasan Timur Indonesia, BaKTI mengajak seluruh peserta untuk merayakan kemajuan dari upaya-upaya yang telah dilakukan, bertukar solusi, bertukar informasi, dan memperluas jaringan untuk dapat

meningkatkan capaian dan mengembangkan inovasi.

“Sebagai organisasi yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, Festival Forum Kawasan Timur Indonesia adalah salah satu agenda rutin utama yang penting untuk dilaksanakan karena merupakan satu dari tiga pilar pertukaran pengetahuan yang diusung oleh Yayasan BaKTI, yaitu acara pertukaran pengetahuan”, kata M. Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI.

Kedua pilar penggerak pertukaran pengetahuan lainnya yang diusung oleh BaKTI adalah jaringan pertukaran pengetahuan dan media pertukaran pengetahuan.

Festival Forum Kawasan Timur Indonesia tahun ini merupakan pertemuan kedelapan dan dengan pendekatan kreatif untuk mendorong terjadinya interaksi yang lebih baik antar pelaku pembangunan. Terdapat tiga program utama dari rangkaian acara Festival Forum Kawasan Timur Indonesia yaitu Panggung Inspirasi, Galeri Informasi, dan *Side Events*.

Panggung Inspirasi

Panggung Inspirasi menampilkan praktik-praktik cerdas dan inspirator yang diidentifikasi oleh BaKTI sejak satu tahun terakhir. Tahun ini tema praktik cerdas yang ditampilkan tahun ini cukup beragam.

Mulai dari kearifan lokal pengelolaan kawasan hutan lindung di Kalaodi, Tidore Maluku Utara yang sejalan dengan hukum negara sampai aplikasi *online* sistem administrasi dan informasi kampung dan distrik di Papua - Papua Barat. Lalu ada pendidikan karakter melalui kelas literasi yang meluas hingga kewirausahaan sosial di Mollo Utara, Nusa Tenggara Timur.

Tak ketinggalan, anak-anak muda keren yang mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel bagi nelayan di Kota Makassar hingga portal analisis data berbasis peta di Kota Manado yang memanfaatkan data terintegrasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pelayanan publik sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Yudhi Rasjid menjelaskan peran WALHI dalam mendorong pengelolaan sumberdaya alam di Kalaodi dan *progress* pengajuan izin perhutanan sosial



Anas Wahab, Ketua Karang Taruna Kalaodi, bercerita tentang pengelolaan lahan yang bersifat komunal di Kalaodi



Lurah Kalaodi, **Bapak Abdul Riwayat Hidi** saat bercerita tentang sejarah Kalaodi menjadi penjaga Tidore





GEN Oil, anak muda makassar yang percaya bahwa pembangunan Indonesia dapat semakin maju dengan energi baru terbarukan berbasis masyarakat. Praktik Cerdas dari Makassar ini mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel dan mendistribusikannya kepada nelayan di kawasan pelabuhan Paotere Makassar. Mereka juga memelopori gerakan mengumpulkan minyak jelantah yang melahirkan inisiatif *Used Cooking Oil Bank (UCO Bank)* dan Tabungan SITAMPAN.



Muflihudin yang kerap dipanggil Fly, sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai preman dan kini menjadi agen pengumpul minyak jelantah sekaligus distributor GEN Oil. Gerakan energi terbarukan berbasis masyarakat ini telah menghadirkan perubahan besar bagi Fly dan kawan-kawannya. Semoga juga menghadirkan perubahan bagi Indonesia!



Hengky Vecky Tewu, Asisten II Setda Kabupaten Manokwari Selatan saat memaparkan manfaat dan pentingnya SAIK dan SAID bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan



Ibu Sonya Aunsi, Kader Kampung Waren, dan Sekretaris Kampung Waren berbagi cerita tentang inisiatif membuat bank darah yang lahir setelah pendataan golongan darah warga sebagai bagian dari penggunaan aplikasi SAID-SAIK



Wakil Walikota Manado, **Mor Dominus Bastiaan** berbagi pengalaman Pemerintah Kota Manado membangun portal *online* analisa data berbasis peta yang dapat dengan efektif digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting pemberian layanan publik dan berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Manado dari pajak dan retribusi daerah



Romo Jimmy Kewohon, Kepala Sekolah SMPK St. Yoseph Freinademetz, Taiftob Kapan Mollo Utara, NTT menceritakan bagaimana 15 anak didiknya yang tergabung dalam Kelas Menulis Kreatif *To The Lighthouse* berhasil menerbitkan buku berjudul *Kap Na'm To Fena* berisi kumpulan cerita pendek keren tentang legenda, fabel, dan keseharian mereka.



Findy Lengga, Siswi Sekolah SMPK St. Yoseph Freinademetz, Taiftob, Kapan, Mollo Utara, NTT dan peserta Kelas Menulis Kreatif *To The Lighthouse* dengan bangga menceritakan pengalaman dan kemajuan yang dialaminya sembari berkarya dan belajar bersama teman-temannya dan para relawan di Lakoat.Kujawas



Steven Ohee, Kepala Distrik Sentani Timur berbagi cerita tentang manfaat data SAID-SAIK dalam perencanaan distrik



Anna Winoto, Team Leader KOMPAK menuturkan perubahan yang lahir dari Program KOMPAK - LANDASAN yang mendorong penggunaan SAID - SAIK



Kepala Bapelitbangda Kota Manado, **Linny Tambajong**, berbagi pengalaman Pemerintah Kota Manado membangun portal *online* analisa data berbasis peta yang dapat dengan efektif digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting pemberian layanan publik dan berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Manado dari pajak dan retribusi daerah



Marlinda Nau, anggota Kelompok Tani Lakoat. Kujawas mengaku tertarik untuk ikut belajar bersama setelah beberapa kali membaca buku di Perpustakaan Lakoat.Kujawas. Selain belajar bersama, Marlinda juga turut memberi diri untuk mengembangkan kembali dan mempromosikan makanan-makanan tradisional yang pernah ditinggalkan warga Taiftob



Dicky Senda berbagi cerita tentang beragam kegiatan komunitas Lakoat.Kujawas dan bagaimana ia dan para relawan tidak bekerja sendiri karena begitu banyak orang yang ikut bergerak bersama dalam mengembangkan tradisi dan budaya Mollo, memajukan Taiftob dengan kewirausahaan sosial, dan meraih mimpi anak muda Mollo melalui kelas literasi dan menulis kreatif.



Menteri PUPR **Mochamad Basoeki Hadimoeljono** saat memaparkan *progress* pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia.



Paparan Dirjen PPMD Kementerian Desa, **Taufik Madjid**, mengenai percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan ekonomi digital



Meiske Wahyu menceritakan pengalamannya dan perjalanan SabangMerauke memberikan kesempatan kepada anak-anak di seluruh Indonesia mengalami toleransi dan menghargai keberagaman, belajar menjadi Indonesia yang seutuhnya



Adi Saifullah Putra mengawali perjalanan kisah inspiratif di hari kedua Festival Forum Kawasan Timur Indonesia dengan berbagi cerita tentang Mallsampah - Layanan Pengelolaan Sampah Online

Ester Wanimbo dari Kampung Karubaga, Tolikara, Papua mengajak mama-mama untuk belajar membuat noken agar tidak terus berhadap pada bantuan pemerintah. Ia mengaku sedang memegang tongkat estafet untuk mengajar mama-mama di sana membaca, menulis, dan berhitung agar mereka juga bisa mendapatkan cahaya huruf dan belajar firman Tuhan serta mampu mengelola ekonomi keluarga.



Arie Kriting, seorang komika dan rekan seperjuangan BaKTI dalam melawan stigma negatif tentang kawasan timur Indonesia kembali hadir dan mengingatkan pentingnya jati diri sebagai orang melanesia yang juga merupakan kekayaan Indonesia



Samsul Widodo, Inspirator Festival Forum Kawasan Timur Indonesia, Dirjen PDT Kementerian Desa yang sekaligus pelopor program Inovasi Desa menceritakan pentingnya *digital marketplace* untuk mengangkat produk-produk unggulan dari desa ke pasar nasional bahkan internasional.



Pasikola adalah sebuah inisiatif hasil kreasi bersama Pemerintah Kota Makassar, komunitas kreatif, Organda, LSM dengan dukungan UNDP. Layanan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas termasuk aplikasi *online* yang semuanya merupakan masukan dari pengguna layanan (siswa dan orangtua). Saat ini tersedia 10 unit Pasikola di Kota Makassar dan akan terus bertambah



Kaharuddin Kadir, Ketua DPRD Kota Parepare menceritakan perubahan positif yang dirasakannya sebagai wakil rakyat setelah melaksanakan metode Reses Partisipatif.



Nurjannah, anggota sebuah kelompok konstituen di Kota Parepare, menceritakan pengalamannya mengikuti Reses Partisipatif dan manfaat yang ia rasakan sebagai masyarakat yang aspirasinya mendapatkan respon positif dari perwakilan rakyat.



Chaidir Syam, Ketua DPRD Kabupaten Maros menceritakan pengalaman dan manfaat yang dirasakan saat melaksanakan Reses Partisipatif - sebuah metode pelaksanaan reses yang mengangkat nilai-nilai partisipatif dan menjangkau sebanyak-banyaknya aspirasi konstituen dari berbagai lapisan.



Curah Ide

Curah Ide adalah bagian acara Festival Forum Kawasan Timur Indonesia yang memungkinkan setiap peserta untuk saling berbagi pengalaman dan inspirasi serta mencurahkan komitmen baru yang dapat dilakukan sendiri dan bersama-sama di daerah masing-masing bagi pembangunan berkelanjutan Indonesia.



Peserta Festival Forum Kawasan Timur Indonesia dengan bangga menunjukkan lembar Curah Ide yang memuat komitmen baru untuk dilakukan secara individu dan kolektif di daerah masing-masing bagi pembangunan berkelanjutan Indonesia



Ketua Dewan Pembina Yayasan BaKTI **Dr. Willi Toisuta** menutup rangkaian Festival Forum Kawasan Timur Indonesia dengan sebuah pesan "Mari kita bekerja bersama-sama oleh karena kemampuan itu sudah ada pada kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita, menolong KTI, dan menolong bangsa ini"

Side Events

Festival ini mengajak setiap peserta untuk menjalin hubungan harmonis dan saling mendukung antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mitra pembangunan internasional, sektor swasta, komunitas, akademisi, jurnalis, dan individu lainnya dengan berfokus pada aset yang dimiliki diri dan kelompok untuk dikembangkan secara positif dalam mendorong berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian dari Indonesia yang berdaulat.



Dimensi Baru Kemitraan CSO dan Pemerintah

Diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa No. 16 Tahun 2018 memungkinkan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mendorong kebijakan berbasis riset, pengurangan kemiskinan, dan penguatan kualitas pelayanan publik di garis depan. Perpres ini juga memungkinkan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan untuk dapat terus bekerja membantu kelompok-kelompok terpinggirkan di berbagai daerah di Indonesia. Sesi ini mendiskusikan dimensi dan peluang baru kemitraan antara CSO dan pemerintah yang didukung oleh Perpres ini sekaligus melihat beragam tantangan yang mungkin dihadapi pada tahap implementasinya.



Developing Inclusive and Creative Economies

Developing Inclusive and Creative Economies (DICE) adalah sebuah program yang dilansir British Council untuk mendukung kewirausahaan sosial dan kreatif di Inggris dan lima negara berkembang utama: Brasil, Mesir, Indonesia, Pakistan, dan Afrika Selatan. DICE mengambil pendekatan lintas sektoral yang inovatif yang memanfaatkan pengalaman dan keahlian Inggris dalam ekonomi kreatif dan sosial untuk mempromosikan pembangunan inklusif dan mendukung kemajuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. British Council Indonesia berbagi informasi tentang DICE dan program lainnya terkait kewirausahaan sosial dan warga aktif serta melihat peluang kolaborasi.



Reses Partisipatif: Narasi Rakyat di Legislatif

pengalaman sukses dan pembelajaran dari mereka yang telah menerapkan Reses Partisipatif.

Sejak tahun 2015, Program MAMPU Yayasan BaKTI memperkenalkan metode reses yang partisipatif bagi anggota DPRD untuk dapat menyerap aspirasi rakyat sekaligus wadah bagi masyarakat untuk bertemu dan menyampaikan permasalahannya kepada pemerintah daerah. Dalam tiga tahun terakhir, Reses Partisipatif telah diterapkan di Maros, Parepare, Tana Toraja, Lombok Timur, Ambon, dan Belu. Reses Partisipatif juga sukses direplikasi di Bengkulu. Dalam acara ini kita mendengarkan



Youth Showcase

dan program yang berkaitan dengan pembangunan pemuda yang selama ini telah dimulai oleh pemerintah. IPP 2017 mencakup lima domain, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kehadiran IPP 2017 diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia.

Pada tanggal 13 Juli yang lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) meluncurkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia 2017. IPP berperan penting dalam membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional dan provinsi untuk meninjau keefektifan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan pemuda yang selama ini telah dimulai oleh pemerintah. IPP 2017 mencakup lima domain, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kehadiran IPP 2017 diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia.



Kemandirian Pangan dari Desa Berdaya

dan dapat dilakukan untuk meningkatkan akses petani terhadap input pertanian bersubsidi dari pemerintah serta fasilitas-fasilitas lain yang mendukung pemenuhan hak masyarakat atas pangan.

Dalam rangka pemenuhan hak atas pangan maka upaya dilakukan pada aspek ketersediaan dan akses. Pada aspek ketersediaan, penyediaan input menjadi penting dilakukan. Input yang memadai diharapkan dapat meningkatkan produksi yang menyebabkan ketersediaan pangan pun meningkat. Pada kegiatan ini, mendiskusikan beragam upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan akses petani terhadap input pertanian bersubsidi dari pemerintah serta fasilitas-fasilitas lain yang mendukung pemenuhan hak masyarakat atas pangan.



Masyarakat Terlibat Hasil Belajar Murid Meningkat

pendidikan, serta mengaitkan pembayaran tunjangan khusus guru dengan kehadiran dan kualitas layanan guru di sekolah.

Inovasi KIIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan di desa-desa sangat tertinggal. Setelah berjalan lebih dari setahun, program ini berhasil meningkatkan hasil belajar murid dengan memberdayakan masyarakat dan orang tua murid untuk terlibat dalam



Lab on Wheels

masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintahan) di kawasan timur Indonesia tentang manfaat penggunaan sumber data baru untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, dan juga untuk merancang dan mengevaluasi program pembangunan.

Melalui Lab on Wheels, Pulse Lab Jakarta berbagi informasi kepada para pemangku kepentingan (pemerintah daerah, organisasi



Papua Insights

pelaku pembangunan di Papua berbagi pengalaman dalam melakukan inovasi dan pendekatan yang sesuai konteks pembangunan Papua, khususnya penguatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung, penguatan tata kelola kecamatan/distrik untuk mendukung perbaikan pelayanan dasar peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di tingkat SD, khususnya pada aspek penguatan tata kelola sekolah dan peningkatan kemampuan calistung pada siswa dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan, terutama intervensi penanganan malaria.

Pelaku pembangunan di Papua berbagi pengalaman dalam melakukan

Galeri Informasi

Festival ini mengajak setiap peserta untuk menjalin hubungan harmonis dan saling mendukung antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mitra pembangunan internasional, sektor swasta, komunitas, akademisi, jurnalis, dan individu lainnya dengan berfokus pada aset yang dimiliki diri dan kelompok untuk dikembangkan secara positif dalam mendorong berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian dari Indonesia yang berdaulat.



Tiga belas lembaga menampilkan beragam produk pengetahuan dalam Galeri Informasi. Mereka adalah Ditjen PKP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; Pemerintah Kabupaten Maros; DFAT Australia; KIAT Guru; British Council; SMERU; UNFPA; OXFAM Indonesia; Invest Co Op; CCPHI – AKATIGA; USAID IUWASH, Asia Pulp and Paper Sinar Mas dan Tenoon.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Festival Forum KTI VIII, hubungi kami melalui info@bakti.or.id

RPJMN 2019 – 2024

Perspektif Kepentingan Pembangunan KTI

Oleh **A. M. SALLATU**



Bagaimana *self-assessment* provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memasuki tahun ke lima pelaksanaan RPJMN 2014-2019 di wilayahnya? Hal tersebut tentunya menjadi *urgent*, mengingat saat ini BAPPENAS dalam tahap penyusunan *background study* naskah teknokratik RPJMN 2019-2024. Sampai sekarang peran program pembangunan nasional tetap signifikan dalam mendorong pembangunan regional, terutama dan apalagi pembangunan KTI.

Secara teoritik maupun empirik, kerangka perencanaan pembangunan nasional merupakan payung perencanaan setiap wilayah

provinsi, untuk selanjutnya setiap wilayah mampu membuat kerangka kontribusinya melalui perencanaan. Karena itulah telah menjadi premis bahwa kepentingan pembangunan regional sejatinya merupakan kepentingan pembangunan nasional itu sendiri. Walaupun tentunya wawasan dasarnya tetap bisa dibedakan, yaitu bahwa pembangunan nasional akan lebih menekankan pada wawasan sektoral sedang pembangunan regional lebih mengedepankan wawasan regional atau wilayah. Sejatinya dalam kedua wawasan ini tidak ada dikotomi. Dalam arti, sudut pandang pembangunan regional atau pengembangan wilayah diletakkan di depan, kemudian tentunya



akan sangat membutuhkan dukungan pembangunan sektoral.

Dalam perspektif berpikir di atas, ada dua fenomena nyata yang patut dicermati. Pertama, angka *Gini Ratio* yang memperlihatkan bahwa kondisi di KTI dalam empat tahun terakhir (2015-2018) masih tinggi dan fluktuatif, bahkan sebagian berada di atas angka *Gini Ratio* Indonesia. Padahal di sisi lain, pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di KTI berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Itu berarti, pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat di KTI patut mendapatkan perhatian serius ke depan. Apalagi dari angka *Gini Ratio* terkesan bahwa peningkatan yang terjadi di KTI turut mendorong meningkatnya angka *Gini Ratio*

Adanya sektor strategis yang bisa secara langsung meningkatkan pendapatan nyata di masyarakat amatlah penting, terutama bagi kelompok masyarakat 40 persen terbawah dalam ukuran pendapatan pada masing-masing provinsi.

Foto : Musfarayani / Yayasan BaKTI

nasional. Dengan demikian, penanganan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di KTI butuh upaya-upaya sistematis dan terukur.

Kedua, Asia Competitiveness Institute, National University of Singapore (ACI-NUS) belum lama ini mempublikasikan temuan awalnya tentang Daya Saing Provinsi-Provinsi di Indonesia, memperlihatkan bahwa kondisinya sangat tidak mengembirakan. Sulawesi Selatan,



yang meskipun tergolong ke dalam 10 provinsi yang tertinggi skornya (0.249), terpaut sangat jauh dengan skor DKI (3.172) yang menduduki peringkat pertama pada tahun 2018 ini. Pada peringkat 10 terendah, terdapat enam provinsi di KTI, yaitu Papua, Sulawesi Barat, NTT, Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat. Gambaran ini memperlihatkan bahwa sektor swasta masih kurang tertarik untuk ikut berperan dalam pembangunan KTI. Karena itu, mau atau tidak mau, harapan besar masih harus diletakkan pada alokasi program dan penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemihakan nyata dalam kerangka pembangunan nasional menjadi hal yang niscaya bagi pembangunan KTI untuk mengejar ketertinggalan dan memperkecil kesenjangan antar kawasan di tanah air.

Pertanyaannya adalah, dengan pengamatan secara lebih jauh terhadap kedua fenomena diatas, pemerataan pendapatan dan kapasitas daya saing wilayah, di satu pihak akan menjadi kebijakan strategis pada skala nasional, dan di lain pihak agenda strategis yang dipilih oleh masing-masing provinsi untuk diangkat ke skala

Pemanfaatan sumberdaya teknologi dan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan. Sayangnya, di KTI, tak hanya pendapatan yang tak merata, dua faktor tersebut pun tak merata di masing-masing wilayah.

Foto : Adwit Pramono / Yayasan BaKTI

nasional. Seyogyanya dapat menjadi kesepahaman bahwa kedua fenomena nyata di atas sulit untuk di *approach* melalui pendekatan proyek ataupun melalui kegiatan pembangunan yang teknis. Melainkan membutuhkan suatu kerangka yang bersifat konseptual, berbentuk Program Agenda Aksi.

Sejauh ini sebenarnya melalui skema program pembangunan nasional yang sejatinya diarahkan baik untuk tujuan pemerataan pendapatan maupun untuk meningkatkan daya saing wilayah sudah tersedia. Namun dengan gambaran kedua fenomena nyata di atas, sekilas dapat disimpulkan bahwa belum mampu mencapai kinerja yang optimal. Disamping masih menghadapi sejumlah kendala dan hambatan dalam implementasinya. Nampaknya pengendalian dan tata kelola baik yang ditangani langsung oleh pemerintah (pusat) maupun yang

Mungkin, walaupun naif, dapat dikatakan bahwa sejauh ini terlalu banyak yang mampu direncanakan tetapi tidak banyak hasil yang mampu diperoleh, termasuk hasil kumulatif dalam kinerja pemerataan pembangunan dan daya saing wilayah misalnya.

berada dalam kewenangan daerah masih tidak efektif.

Dalam sejarah perkembangan pembangunan di Indonesia selama ini, harus diakui bahwa konseptualisasi dan perumusan program pembangunan pada dasarnya bisa terjustifikasi validitasnya. Tetapi pada akhirnya selalu saja kinerja yang bisa dicapai nyaris selalu kurang optimal. Hal ini mengisyaratkan bahwa di satu sisi '*planning matters*' masih melekat dalam rumusan perencanaan. Di lain sisi, disiplin dan konsistensi dalam implementasi perencanaan masih belum dapat ditegakkan secara baik. Itu berarti, sebelum berbicara lebih banyak dan lebih jauh tentang skema perencanaan pembangunan, terdapat masalah manajemen perencanaan pembangunan yang perlu juga mendapatkan porsi perhatian, terutama di KTI sendiri. Pada skala provinsi, mungkin saja rentang kendali manajemen perencanaan pembangunan masih terlalu lebar. Untuk itu, penting untuk dipikirkan tentang penguatan kelembagaan perencanaan yang ada saat ini, karena secara umum kapasitas SDM aparat yang dimiliki telah cukup memadai.

Sejauh ini, disamping masalah pemerataan pendapatan dan kapasitas daya saing wilayah, juga tetap mengemuka kepentingan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan SDA, SDM dan sumberdaya teknologi yang tersedia pada masing-masing wilayah provinsi.

Kesemuanya ini sepatutnya mampu diintegrasikan dalam suatu kerangka perencanaan, berbeda dari yang kuat terkesan sampai saat ini bahwa kesemuanya baru ada dalam suatu penjumlahan perencanaan. Permasalahan pokok proses integrasi tersebut akan jelas nampak bila diamati dan dipertanyakan dimana atau siapa yang menjadi *leading sector* untuk kelembagaan dan pelembagaan perencanaan pembangunannya? Pada poin ini, suka atau tidak suka, patut untuk dikemukakan bahwa '*institutional matters*'.

Kehadiran rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka tahunan, belumlah dapat dikatakan '*taken for granted*' akan mampu mencapai kinerja pembangunan sebagaimana yang diharapkan. Mungkin, walaupun naif, dapat dikatakan bahwa sejauh ini terlalu banyak yang mampu direncanakan tetapi tidak banyak hasil yang mampu diperoleh, termasuk hasil kumulatif dalam kinerja pemerataan pembangunan dan daya saing wilayah misalnya. Oleh karena itu, tantangan dan peluang dalam kerangka RPJMN 2019-2024 tidak hanya terbatas pada kecermatan menemukan sektor strategis provinsi saja, melainkan juga bagaimana mengendalikan dan menata-kelola pencapaian kerjanya.

Kepentingan pembangunan KTI adalah mengacu dan bertumpu pada manusia yang hidup dan berpijak di KTI. Itu berarti, yang dibutuhkan adalah kehadiran sektor strategis yang mampu secara langsung meningkatkan pendapatan nyata masyarakat di KTI, terutama pada kelompok masyarakat 40 persen terbawah dalam ukuran pendapatan pada masing-masing provinsi. Dengan demikian, hasil Susenas dalam berbagai seri dan hasil sensus pertanian 2013, sepatutnya dapat membentuk wawasan perencanaan, bagaimana mengembangkan wilayah di KTI. Dapat diduga bahwa sejumlah unggulan baru yang akan memperkuat sektor strategis yang ingin dikembangkan akan teridentifikasi secara lebih jelas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JKTI) dan dapat dihubungi melalui email madjid76@gmail.com



Ilustrasi Ichsan Djunaed

Leave no She Behind

Involving Women
in Policy-making
and Peacemaking

Oleh **AYUNDA NURVITASARI**

Perempuan seringkali tidak diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dan inilah waktunya untuk melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan tidak ada lagi perempuan yang tertinggal. Dialog regional yang diadakan beberapa waktu lalu oleh MAMPU, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, mengangkat topik kesenjangan gender yang tersebar di Indonesia yang telah gagal mengangkat perempuan yang terpinggirkan dari kemiskinan dan siklus kekerasan.

Bertema *"Leave No She Behind"* forum yang bertujuan untuk mendorong sasaran pembangunan berkelanjutan yang responsif gender dan transformatif (SDGs) ini, secara khusus menargetkan perempuan yang terpinggirkan dan rentan yang ditinggalkan selama seluruh proses pembangunan.

"Dialog regional ini akan menjadi ruang bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan belajar dari inisiatif yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, baik di Indonesia maupun negara tetangga kami," kata Woro Srihastuti Sulistyoningrum, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak-Anak, Pemuda, dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Fleur Davis, Minister-Counsellor, Kedutaan Besar Australia mengatakan, "Kami perlu memastikan bahwa suara wanita turut di dengar dalam proses pembuatan kebijakan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan kondisi wanita dan mengembangkan tindakan nyata".

MAMPU mencatat bahwa kesenjangan gender di Indonesia bermanifestasi dalam berbagai masalah, dari tingginya tingkat

.....Kita harus mulai membawa perempuan ke pusat, memberi mereka ruang untuk bersuara.

perkawinan anak (34 persen di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat), kematian ibu di 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup, *stunting* pada 37 persen anak-anak Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga, sekolah terganggu, dan partisipasi perempuan yang rendah dalam angkatan kerja.

Sri Dianti Anwar, Staf Ahli Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, mengatakan pemerintah telah berfokus pada ketahanan keluarga, yang mencakup ketahanan ekonomi, kesehatan, dan psikologis.

"Kita dapat mengatasi masalah saat ini dengan bekerja pada tiga kunci utama: ketahanan masyarakat (melibatkan komunitas tingkat akar rumput), aliansi masyarakat sipil dan organisasi, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia. Hanya dengan melakukan ini, kita dapat mengatasi isu-isu mengenai kesetaraan gender, kekerasan, dan diskriminasi gender," katanya.

Dr. Rashidah Shuib dari Universiti Sains Malaysia, Jurusan Ilmu Kesehatan mengatakan bahwa pemerintah biasanya sangat lambat dalam mengenali dan menanggapi isu-isu mengenai wanita yang rentan. Inilah mengapa penting untuk membawa suara perempuan dalam proses politik, katanya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendengarkan langsung dari para perempuan terpinggirkan dan bukan hanya orang-orang seperti saya, tapi kita semua perlu memberi perhatian terhadap kebutuhan

mereka. Kita harus mulai membawa perempuan ke pusat, memberi mereka ruang untuk bersuara.”

Pendidik Jurnalisme dari Universitas Phillipines-Diliman Yvonne Chua berbicara tentang penggunaan media sosial untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam memantau pembuat kebijakan. Yvonne mengaktifkan kembali gerakan #BabaeAko untuk melawan komentar sexist dan misogynis.

Ketika Presiden Duterte berbicara tentang kualitas yang harus dimiliki oleh Ombudsman berikutnya, dia berkata, "Saya ingin seseorang yang integritasnya dipercaya orang banyak. Tentu saja, itu tidak mungkin seorang politikus, terutama bukan wanita." Dia menginstruksikan Angkatan Bersenjata dari Filipina untuk menembak para pemberontak di dalam vagina. Dia juga melanggar hukum dengan bersiul dan melontarkan seorang reporter perempuan selama konferensi pers.

Hal ini menyebabkan jaringan perempuan dan aktivis untuk mengambil sikap yang kuat terhadap Presiden. Pada tanggal 20 Mei mereka secara resmi meluncurkan kampanye media sosial #BabaeAko (saya seorang wanita) untuk memprotes perilaku seksis dan misogynis Presiden dengan menggunakan tagar #BabaeAko. Gerakan itu menyebabkan protes jalanan.

Yvonne Chua percaya melakukan kampanye media sosial yang efektif dapat membantu menyalurkan tuntutan dan kritik perempuan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan nasional.

"Kita perlu meningkatkan sinergi dan pada saat yang sama mendorong pemantauan pada implementasi kebijakan. Juga sangat penting untuk memberdayakan perempuan di tingkat akar rumput dan distrik,"katanya.

Dia juga menunjukkan pentingnya ponsel dalam meningkatkan kemajuan perempuan sebagai sumber utama informasi dan literasi serta alat komunikasi dan kolaborasi.

"Di Indonesia, 184 juta lebih sedikit wanita daripada pria yang memiliki ponsel. Selain itu, 1,2 miliar wanita masih belum menggunakan internet seluler. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri apabila perempuan ingin menyatukan suara dan seruan untuk aksi suara

dan panggilan yang jelas untuk tindakan," tambahnya.

Juga dalam diskusi panel, Alissa Wahid dari Gusdurian, sebuah jaringan komunitas yang berfokus pada isu-isu agama dan kemanusiaan mengadopsi pemikiran dan filosofi mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyoroti masalah keterlibatan perempuan dalam terorisme dalam iklim eksklusivisme agama saat ini.

"Akhir-akhir ini, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa terorisme adalah tindakan seorang pria. Serangan pemboman terakhir pada 13 Mei membuktikan bahwa para wanita telah melangkah maju. Mereka tidak lagi bekerja di belakang, menjadi perekrut atau pendukung, atau mengurus logistik. Sekarang, wanita berkontribusi lebih banyak dalam aksi terorisme. Versi 'kesetaraan gender' mereka diterjemahkan tidak hanya pria yang dapat melakukannya (menjadi pelaku bom bunuh diri), wanita juga dapat melakukannya," Alissa menjelaskan.

Alissa menegaskan bahwa tujuan-tujuan tersebut harus mendorong perempuan menjadi agen perdamaian aktif. "Kita harus memastikan bahwa perempuan memainkan peran mereka untuk menerapkan nilai-nilai 'perdamaian' selama gelombang intoleransi, dan kita dapat melakukan ini dengan menerapkan program yang menantang ekstremisme dan radikalisme, yang telah berkembang biak dalam masyarakat kita."

Hal senada juga disampaikan oleh Sri Dianti tentang pentingnya mengarusutamakan pemikiran progresif dan cara moderat dalam menjalankan agama.

"Kami membutuhkan lebih banyak orang dan pemuka agama yang cukup berani untuk mengatasi masalah ekstremisme saat ini. Saya percaya bahwa melawan narasi yang cenderung diskriminatif dan konservatif hanya dapat dilakukan dengan mengarusutamakan perspektif progresif. Di sinilah wanita bisa maju," katanya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini dari laman Magdalene.co

<https://magdalene.co/news-1849-leave-no-she-behind-involving-women-in-policymaking-and-peacemaking.html>



Foto: Rio Afifuddin / Yayasan BaKTI

Pentingnya Kebijakan Publik Berbasis Bukti

Oleh **RIO AFIFUDDIN**

Selama dua hari pelaksanaan di tanggal 7-8 Agustus 2018 di Hotel Melia Makassar, Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Pusat Analisis Kebijakan - Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN) dan Knowledge Sector Initiative (KSI) melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Indeks Kualitas Kebijakan, sebuah instrumen yang sederhana, efektif, mudah untuk digunakan, serta berbasis *online* untuk menilai kualitas kebijakan publik dengan cara

self-assessment. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini dengan mengundang partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, baik dari Badan Penelitian dan Pengembangan, Biro Hukum, Bappeda dan dinas-dinas teknis terkait pelayanan dasar publik dari pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan sosialisasi, instruktur kegiatan dari PUSAKA-LAN mengemukakan



latar belakang, konsepsi, tujuan, kegunaan serta manfaat IKK bagi peningkatan kualitas kebijakan publik bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Latar belakang pengembangan IKK didasarkan bahwa hasil kajian mengenai banyaknya kebijakan publik yang bermasalah; multi tafsir, tumpang tindih, tidak konsisten, mahal, tidak berlangsung lama, dan berkonflik dengan kebijakan lain. Permasalahan ini juga diidentifikasi bahwa berada dari proses penetapan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Hal-hal ini yang ditekankan dalam proses membuat kebijakan, bahwa strateginya perlu difokuskan pada bagaimana sebuah kebijakan bisa aplikatif dan berdampak, serta sebuah kebijakan perlu didasarkan oleh bukti (*evidence-based*).

Identifikasi Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016 adalah terdapat lebih dari 3.400 kebijakan publik baik di tingkat pusat maupun daerah (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) yang bermasalah, hingga

dibatalkan atau dicabut. Perlu ditekankan bahwa proses penyusunan dan tahap pelaksanaan dari setiap kebijakan tersebut perlu memikirkan *cost-benefit* dan materi yang patut diperhitungkan, yang mana anggaran yang disiapkan dan dikeluarkan untuk kebijakan di tingkat pusat dan daerah sangatlah tinggi. Melihat kondisi seperti ini, dapat disimpulkan bahwa dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari potret kebijakan di Indonesia, dibutuhkan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk itu, IKK dikembangkan oleh PUSAKA-LAN sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengukur apakah kebijakan telah dibuat berdasarkan adanya bukti atau fakta empiris yang menaunginya. Melihat dari fakta diatas mengenai kuantitas kebijakan publik yang bermasalah, instrumen ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi proses yang mana yang perlu dibenahi baik dari hulu (perencanaan) maupun di hilir



(implementasi dan evaluasi), karena selama ini belum ada tolok ukur untuk mengukur variabel kualitas kebijakan, sekaligus potret dari reformasi birokrasi.

Dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis IKK untuk Pemda se-Sulawesi Selatan, instruktur kegiatan bersama dengan BaKTI dan perwakilan PKP2A II LAN Makassar memberikan arahan dan simulasi mengenai operasionalisasi pengisian portal berbasis web IKK kepada peserta. Dalam hari kedua ini, peserta juga memberikan presentasi berkelompok untuk hasil diskusi dan kesan bersama setelah proses pengisian dan operasionalisasi IKK yang telah dilakukan.

Sosialisasi IKK melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis yang erat kaitannya dengan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, yang diantaranya adalah Bidang Hukum, Badan Litbang, Bappeda, Bidang

Organisasi, dan Dinas-Dinas lainnya terkait pelayanan dasar seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Sosial, dan Dinas Ketertiban Umum.

Kegiatan ditutup oleh Bpk. Drs. H. Tautoto Tanna Ranggina, M.Si, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penutupnya, beliau menekankan bahwa dua kata yang perlu disoroti dalam IKK adalah kata “kualitas” dan “kebijakan”, yaitu dalam kebijakan publik, semua akan bermuara pada manfaat dari kebijakan yang dihasilkan, itulah yang dinamakan kualitas. Dalam mewujudkan sebuah kebijakan publik yang berkualitas tersebut, maka kebijakan perlu diselenggarakan dengan berbasis pada bukti dan pengetahuan, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat lebih terarah dan implementatif, serta tepat sasaran.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Indeks Kualitas Kebijakan dan kerjasama BaKTI, KSI-LAN untuk Peningkatan Kompetensi Analisis Kebijakan, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Narasi Pertanian Organik di Distrik Akat

Oleh **PETRUS PIT SUPARDI**

Dentum tifa dan nyayian khas Asmat menggema di dermaga kampung Cumnew. Ratusan orang, laki-laki, perempuan dan anak-anak mengenakan busana tradisional Asmat. Mereka bernyanyi dan menari-menari. Sukacita besar tampak di raut wajah mereka. Kapur putih dihamburkan ke udara. Hari itu, Sabtu, 22 September 2018, mereka akan melakukan panen raya sayur organik. Panen raya ini juga dihadiri oleh Tim Monev KOMPAK.

Di kebun-kebun sayur milik masyarakat, tampak sayur hijau dan segar. Ada kangkung dan sawi yang siap dipanen. Ratusan petak sayur



Setda Kabupaten Asmat, Bartolomeus Bokoropces bersama Tim DFAT dan BAPPENAS melakukan panen raya sayur organik di Kampung Cumnew, Distrik Akat, 21 September 2018.

Foto : Petrus Supardi / Yayasan BaKTI

Pastor Paroki St. Martinus de Pores Ayam di Pastoran Ayam. Selama di Ayam, ia mendampingi para petani sayur organik di lima kampung di pusat Distrik Akat, yaitu kampung Waw Cesau, Ayam, Bayiw Pinam, Cumnew dan Jowes.

Bruder Eli berkisah bahwa sebelum dirinya berangkat ke Ayam, beberapa saudaranya merasa pesimis terhadap usaha pertanian organik di Distrik Akat. “Mereka bilang saya hanya menghabiskan waktu dengan pergi ke Asmat dan melatih orang peramu. Pada awalnya, saya sendiri kurang yakin, tetapi saya bertekad pergi ke Asmat” ucapnya.

“Waktu saya tiba di Ayam, saya membaca semangat para petani. Saya menemukan semangat orang-orang Asmat di Ayam untuk bertani sangat baik. Selain itu, saya melihat mereka pahat kayu (mengukir). Kayu keras bisa mereka pahat tanpa sketsa. Kita juga bisa lihat bahwa mereka bisa menanam umpak kayu besi ke dalam tanah. Artinya, mereka memiliki kemampuan bekerja yang mengagumkan. Kalau kayu keras saja mereka bisa pahat dan umpak kayu besi yang berat saja mereka mampu tanam ke dalam tanah, apa lagi tanah lembek, saya yakin mereka pasti bisa menjadi petani,” Lanjutnya.

Berbekalkan alat pengukur pH tanah, ia mengukur tingkat keasaman tanah. Hasilnya, pH tanah di Ayam cukup tinggi sehingga harus ada intervensi berupa pemberian kapur, abu dapur serta pembuatan parit untuk mengalirkan air sehingga pH tanah bisa menurun dan bisa ditanami berbagai jenis sayur.

Ia menjelaskan bahwa tanah di kampung Cumnew dan kampung lainnya di Asmat pada saat pertama kali dibuka hasilnya akan kurang bagus karena terlalu basah dan pH tanah cukup tinggi. Tetapi, pada saat tanam kedua dan ketiga hasilnya pasti bagus, karena tanah mulai kering

lainnya sedang tumbuh. Ratusan warga masyarakat di kelima kampung dan Tim Monev KOMPAK melakukan panen raya sayur di petak yang sudah siap panen.

Di balik hijaunya sayur organik di Ayam, Distrik Akat, terdapat sang arsitek pertanian organik yang menanganinya dengan tepat. Dia adalah Bruder Elias Logo OFM. Lelaki asal Wamena, Papua ini adalah seorang biarawan Fransiskan dan merupakan ahli pertanian organik di Papua.

Bruder Eli, sapaannya, tiba di Ayam, Distrik Akat pada Minggu, [19/8]. Selama mendampingi petani sayur organik di Ayam, ia tinggal bersama



dan pHnya sudah menurun. Sedangkan tanam keempat harus ada intervensi lagi, yaitu pupuk kompos karena unsur hara tanah sudah berkurang. Karena itu, instalasi pupuk kompos sangat dibutuhkan di Ayam.

Berdasarkan pengalamannya bersama petani sayur di Ayam selama satu bulan, Bruder Eli mengatakan bahwa mendampingi orang Asmat perlu dilakukan dari jarak dekat. Ia juga menjelaskan setiap orang yang mau datang ke Asmat untuk mendampingi petani, harus tinggal bersama dengan mereka di kampung-kampung. Selain itu, harus menguasai teknik pertanian, mulai dari pengolahan tanah, cara tanam, perawatan sampai panen karena setiap jenis sayur memiliki cara tanamnya sendiri. Misalnya, kangkung, tomat, cabe, masing-masing memiliki teknik tanam dan perawatannya sendiri.

Dentum tifa perbaikan gizi masyarakat melalui ketersediaan sayur organik di Distrik Akat telah ditabuh. Bruder Elias Logo telah mendampingi para petani sayur di pusat Distrik Akat selama satu bulan (21 Agustus-19 September 2018). Harapannya ke depan, pertanian organik akan tetap berlanjut sehingga

Bruder Elias Logo OFM sedang bekerja bersama para petani sayur organik di Kampung Bayiw Pinam, Distrik Akat.

Foto : Arita Adelheid O. Meak / Yayasan BaKTI

pengetahuan dan teknik pertanian yang diberikan oleh Bruder Eli tidak lenyap ditelan waktu. Selain itu, beliau juga berharap agar Distrik Akat bisa menjadi daerah penghasil buah-buahan.

Selama mendampingi para petani sayur di Ayam, Bruder Eli menekankan pentingnya mengelola tanah tanpa menggunakan pestisida. Ia mengajak segenap masyarakat untuk tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida karena akan merusak keseimbangan ekosistem. Karena itu, harus menggunakan pupuk organik.

Untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan pupuk organik, Bruder Eli berharap KOMPAK LANDASAN bisa memfasilitasi pendirian instalasi pupuk organik di Ayam. "Sekali lagi, KOMPAK LANDASAN bisa mendorong pemerintahan kampung dan Dinas Pertanian untuk mendirikan instalasi pupuk kompos sehingga masyarakat bisa menggunakannya untuk pertanian organik," tandasnya.



Bruder Elias Logo OFM sedang menjelaskan tentang pertanian organik kepada anak-anak SD Persiapan Negeri Cumnew. Anak-anak terlibat dalam pembuatan kebun sayur sekolah.

Foto : **Arita Adelheid O. Meak / Yayasan BaKTI**

Pelaksanaan kegiatan pertanian organik di Distrik Akat diikuti oleh kelompok petani dari kampung Waw Cesau, Ayam, Bayiw Pinam, Cumnew dan Jowes. Setiap kampung membentuk satu kelompok terdiri atas lima orang. Selain itu, melibatkan SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam, SD YPPGI Ayam, SD Persiapan Negeri Cumnew dan SMP Negeri 1 Agats, Akat dan Puskesmas Ayam.

Selama pendampingan, setiap hari Bruder Elias Logo OFM mendampingi kelompok-kelompok petani secara bergiliran. Bruder Eli mengajarkan teknik membuat petak (bedeng), menabur benih, menanam tumpang sari dan merawat sayur yang telah tumbuh.

Hasilnya, sayur tumbuh dengan subur dan tertata rapi. Sayur yang ditanam adalah kangkung, sawi, tomat, terong. Pada Sabtu, [22/9], Tim Monev KOMPAK bersama Sekda Kabupaten Asmat, Bartolomeus Bokoropces dan

Kepala OPD di lingkungan pemerintahan Setda Kabupaten Asmat melaksanakan panen raya sayur di Distrik Akat.

Tim Monev KOMPAK yang hadir di Ayam dan mengikuti kegiatan panen raya sayur organik adalah Astrid Kartika, Unit Manager, Human Development, Kedutaan Besar Australia, Joanne Sharpe, Unit Manager, Social Protection, Kedutaan Besar Australia. BAPPENAS terdiri atas, Vivi Yulaswati, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, Alen Ermanita, Plt. Kasubdit Aparatur Pemerintah Daerah, Direktorat OTDA Kementerian Dalam Negeri, Dharendra Wardhana, Staff Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Bappenas, Ted Weohau, *Implementation Director-KOMPAK*, Heracles Lang, *Special Autonomy Implementation Improvement Lead*, KOMPAK, Nia Firtica, *Communications and Media Relations Lead*, KOMPAK, Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, serta tim KOMPAK - LANDASAN II Papua.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KOMPAK-LANDASAN II, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Melanjutkan Praktik yang Baik

Oleh **GUFRON H. KORDI K.**

Pada 21-22 Oktober 2018 bertempat di Hotel Ramedo Makassar, Yayasan BaKTI melaksanakan Workshop Design Exit Strategi Mitra Daerah Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Workshop dihadiri oleh mitra Program MAMPU BaKTI, yaitu Yayasan Kombongan Situru (YKS) Tana Toraja, Yayasan

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) Parepare, Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari, Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua (PPSE-KA) Belu, Yayasan Arika Mahina (YAM) Ambon, dan Sub office MAMPU-BaKTI Nusa Tenggara Barat. Workshop difasilitasi oleh Yudha Yunus dan May Januar.



Foto: Frans Gosali / Yayasan BaKTI

Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, M. Yusran Laitupa dalam pengantarnya mengemukakan bahwa, capaian dan praktik-praktik baik perlu dilanjutkan oleh mitra, mungkin dengan nama lain, tapi memiliki pengalaman melakukan, sehingga tidak dimulai dari awal. Selain itu, penting untuk mengangkat pembelajaran mengenai tulisan atau cerita perubahan yang menjadi salah satu ukuran kualitatif. Mitra harus mendokumentasikan cerita-cerita perubahan, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video/film.

Di Program MAMPU terdapat pembelajaran mengenai cerita perubahan yang merupakan salah satu ukuran kualitatif program yang sangat baik. Ini perlu diadopsi oleh mitra, sehingga menjadi dokumentasi yang baik, yang tidak hanya berguna untuk mitra, tetapi juga pihak lain yang mengakses informasi dan pembelajaran yang baik.

Sejak 2014 beberapa capaian penting program telah didokumentasikan, terutama dalam bentuk tulisan, sebagian di antaranya

merupakan inovasi baru yang beban-benar digagas dan dikembangkan dalam program ini, seperti Reses Partisipatif, Kelompok Konstituen, Pembentukan Peraturan Daerah, dan Advokasi Peraturan Desa.

Reses Partisipatif

Reses Partisipatif merupakan salah satu metode reses yang dikembangkan dalam Program MAMPU-BaKTI. Metode ini pertama kali dikembangkan dan diujicobakan di Parepare. Andi Nurhanjayani adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare yang pertama kali mengujicobakan Reses Partisipatif, selanjutnya dilakukan oleh anggota DPRD Bone, Ambon, Lombok Timur, Mataram, Kendari, Tana Toraja dan Belu. Hingga Oktober 2018, Reses Partisipatif juga telah diterapkan oleh anggota DPRD Bantul, Lampung, Minahasa Selatan, dan Manado.

Metode ini merupakan gagasan murni yang muncul dari diskusi Andi Nurhanjayani dan Ibrahim Fattah, Direktur YLP2EM Parepare.

Kemudian oleh Tim MAMPU BaKTI yang difasilitasi oleh Yudha Yunus mendiskusikan pengembangan metode dan membuat panduan sederhana untuk pelaksanaan Reses Partisipatif.

Penulisan Panduan Reses Partisipatif baru dimulai pada tahun 2017 setelah pelaksanaan Reses Partisipatif dilakukan oleh 20 anggota DPRD. Panduan ini mendapat masukan dari berbagai pihak, baik anggota DPRD, praktisi, maupun ahli.

Reses Partisipatif merupakan salah satu inovasi untuk menjawab keluhan terhadap reses-reses sebelumnya, yang dianggap tidak efektif karena menggunakan metode tatap muka atau ceramah. Di samping itu, peserta reses umumnya adalah elit (aparatur pemerintah, tokoh masyarakat) dan mayoritas laki-laki, yang kemudian memunculkan usulan-usulan yang tidak berpihak pada kebutuhan perempuan, perempuan miskin, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat, dan suasana yang tidak formal. Terminologi “partisipatif” menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif, dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (*focus group discussion/FGD*). Peserta yang hadir dalam reses yang mewakili berbagai unsur di masyarakat, dan ditempatkan sebagai subyek, serta tempat reses tidak formal. Sedangkan perspektif gender menunjuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.

Kelompok Konstituen

Kelompok Konstituen (KK) adalah kelompok yang dibentuk dalam Program MAMPU-BaKTI yang diharapkan menjadi kelompok kritis yang dapat memperjuangkan kebutuhan dan kepentingannya untuk mengakses layanan pemerintah, baik melalui wakilnya di DPRD maupun langsung kepada pihak eksekutif (lurah, camat, SKPD, bupati/walikota).

Karena itu, KK merupakan kelompok masyarakat yang politis, artinya sadar akan hak-haknya sebagai warga negara, sekaligus mempunyai kemampuan untuk mengakses layanan, serta turut serta dalam perubahan kebijakan.

Kelompok ini berbeda dengan kelompok-kelompok kepentingan yang dibentuk berdasarkan profesi atau kegiatan. Kelompok Konstituen dibentuk, tidak hanya untuk mengurus dan memperjuangkan kebutuhan kelompoknya, tetapi juga untuk seluruh masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut (kelurahan/desa/kecamatan/kabupaten-kota).

Anggota KK mayoritas perempuan yang mewakili berbagai unsur di dalam masyarakat. Kelompok kemudian mendapat penguatan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Perempuan (HAP), advokasi, penanganan kasus, dan pengorganisasian.

Dalam perjalanan KK menjadi kelompok yang sangat berdaya dalam mendampingi dan mengadvokasi kasus-kasus di masyarakat. KK menjadi ujung tombak dalam upaya masyarakat mengakses layanan sosial yang disediakan pemerintah. KK juga turut serta dalam perubahan dan pembentukan kebijakan, baik melalui wakilnya di DPRD maupun melalui eksekutif.

Sebagian pengurus dan anggota KK juga memberanikan diri mencalonkan diri menjadi Ketua RT (Rukun Tetangga), Ketua RW (Rukun Warga), dan kepala desa. Ini merupakan kemajuan yang baik dalam mendorong kepemimpinan perempuan.

Paralegal

Paralegal berhubungan dengan KK. Paralegal disiapkan untuk mendampingi dan mengadvokasi kasus-kasus perempuan dan anak, sebagai bagian dari Layanan Berbasis Komunitas (LBK). Paralegal baru mulai disiapkan pada awal tahun 2018, kecuali KK di Parepare yang telah memiliki beberapa Paralegal sejak tahun 2017.

Paralegal yang merupakan bagian KK ini diharapkan dapat memperkuat penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di masyarakat, baik untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan

penanganan sementara bagi korban, dan mendampingi korban dan pelaku dalam proses hukum.

Untuk itu di tingkat masyarakat juga disediakan rumah aman dikenal sebagai *shelter* warga yang menjadi tempat pengamanan atau penitipan sementara korban, sebelum dirujuk ke lembaga layanan yang lain.

Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan hal biasa, karena merupakan salah satu tugas dan fungsi anggota DPRD. Namun, Program MAMPU-BaKTI mengembangkan Pembentukan Perda inisiatif DPRD dengan menguatkan peran anggota DPRD. Pembentukan Perda melibatkan secara penuh anggota DPRD yang bergabung dalam tim Pansus (Panitia Khusus), berbeda dengan sebelumnya, di mana Naskah Akademik (NA) dan Draft Rancangan Perda (Raperda) selalu dibuat oleh konsultan atau tim ahli.

Anggota DPRD terlibat dalam assessmen di masyarakat untuk memperoleh data dan informasi langsung. Pada tahap penyusunan NA dan Draft Raperda yang dilakukan oleh tim, anggota DPRD mengikuti tahap-tahap tersebut, sehingga memahami dengan baik substansi Perda yang dibuat.

Jika dilakukan studi banding untuk mendapatkan informasi dan pengalaman daerah lain, maka tim Pansus mempersiapkan segala sesuatu yang akan dipelajari di tempat tujuan, termasuk membuat kerangka acuan dan daftar kebutuhan yang perlu diperoleh di daerah yang dituju.

Advokasi Kebijakan

Pada fase pertama (2014-2017) Program MAMPU-BaKTI fokus pada mendorong kebijakan yang responsif gender. Beberapa kebijakan berhasil didorong mitra daerah berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati/Walikota, dan Keputusan Bupati/

Walikota. Kebijakan-kebijakan yang didorong berdasarkan tata aturan yang berlaku, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang didorong merupakan kebutuhan, dan dapat diimplementasikan.

Pasca lahirnya sebuah kebijakan, maka yang harus dipastikan adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, seperti adanya anggaran di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan instrumen lain untuk mengimplementasikannya, misalnya pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan lainnya. Kebijakan yang dikeluarkan harus dipastikan dapat diimplementasikan, karena perangkat untuk implementasi harus disiapkan.

Advokasi Peraturan Desa

Tiga wilayah program telah berhasil mendorong lahirnya Peraturan Desa (Perdes), yaitu: Ambon, Lombok Timur, dan Belu. Di Lombok Timur dan Belu, Kelompok Konstituen berhasil mengadvokasi lahirnya Perdes mengenai Perlindungan Perempuan. Ini merupakan kemajuan, karena dengan adanya Perdes, pemerintah dan masyarakat desa mempunyai instrumen untuk melindungi perempuan, sekaligus mengalokasikan Dana Desa untuk melindungi perempuan dan menangani korban.

Di Lombok Timur, dengan menggunakan Dana Desa, Pemerintah Desa telah mengadakan mobil untuk pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan. Mobil tersebut digunakan untuk mengantar perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan lanjutan dan cepat di lembaga layanan yang berada di ibukota kabupaten.

Program dan kegiatan yang dikembangkan Program MAMPU-BaKTI telah melahirkan praktik-praktik yang dapat direplikasi ke daerah lain. Untuk memperkuat praktik tersebut dan memudahkan replikasi, maka akan disiapkan beberapa panduan lagi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program MAMPU BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Mereformasi Sekolah dan Komite Sekolah Serta Meningkatkan Tata Kelola Sekolah

Bagian II - Selesai

Oleh
SUHARTO

Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Pada tahun 2019 akan direkrut 112.000 guru baru. Kementerian sedang menyusun peraturan baru dan akan disampaikan kepada Presiden tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Calon guru yang tidak lulus dalam tes pegawai negeri masih



Kepala Sekolah itu adalah *School Manager*, yang mengelola sekolah dan melindungi para guru. Kepala sekolah harus bisa melindungi dan memberi rasa nyaman kepada para guru.

mempunyai peluang untuk mengikuti seleksi pegawai guru dengan perjanjian kerja. Misalnya, mereka akan dikontrak dalam jangka waktu 5 tahun dan akan dievaluasi apakah layak untuk diperpanjang kontraknya atau dihentikan. Untuk pensiunnya, akan diatur dengan pemotongan sebagian dari gaji pokoknya setiap bulan.

Suasana belajar mengajar di sebuah sekolah di Papua barat. Guru memainkan peran dominan dalam pendidikan, karenanya dukungan fasilitas untuk meringankan beban mereka adalah hal yang penting.
Foto : NJ. Tangkepayung/Yayasan BaKTI

Kepala Sekolah dan Pengawas itu adalah jabatan profesional, yang mengikuti pola karier guru. Kepala sekolah dipilih dari guru terbaik dan Pengawas dipilih dari kepala sekolah terbaik. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian sedang mengusahakan adanya tunjangan khusus baik untuk Kepala Sekolah dan Tunjangan khusus untuk Pengawas Sekolah.

Kepala Sekolah adalah *School Manager*, yang mengelola sekolah dan melindungi para guru. Kepala sekolah harus bisa melindungi dan memberi rasa nyaman kepada para guru.

Fasilitas IT dan Rumah Guru

Bantuan teknologi komunikasi untuk wilayah 3T: Terpencil, Tertinggal dan Terluar. Topografi Papua yang terdiri dari lembah, pegunungan, pesisir dan delta sungai dan sebaran infrastruktur yang belum merata menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan akses terhadap fasilitas pendidikan di Papua. Pemerintah akan selalu berupaya untuk mengatasi masalah ini. Kementerian merencanakan agar tahun 2020 terdapat 4000 sekolah di daerah 3T yang mendapat akses telekomunikasi, Hingga tahun 2018 ini sudah 1400 sekolah yang telah mendapat akses layanan telekomunikasi serta mendorong sekolah-sekolah untuk memanfaatkan "Situs Rumah Belajar" dari Kemendikbud.

Pada tahun 2019 akan dibangun 6000 rumah guru di daerah 3T. Rumah guru ini penting agar guru dan keluarganya bisa hidup tenang dan guru pun dapat mengajar dengan tenang juga. Ke depannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan menangani



MBS harus dimaknai sebagai mekanisme dan ruang di mana kegiatan di luar sekolah pun diberi nilai sebagai proses belajar.

pembangunan fisik lagi, seperti bangunan sekolah dan bangunan rumah guru. Itu semua akan diserahkan kepada Kementerian PUPR. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan fokus pada *content* Pendidikan dan tenaga Pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

MBS intinya adalah belajar itu bisa di mana saja; siapa pun dan dimana pun bisa menjadi tempat belajar bagi anak didik. Substansi dari gagasan *full day learning/ schooling*: belajar di sekolah dan belajar di rumah atau di kampung.

Di rumah atau kampung, atau di tempat kerja ayah atau ibunya, anak-anak juga bisa belajar dan menyerap nilai-nilai dari orang tuanya yang sedang bekerja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mengupayakan adanya rapor ganda: rapor akademik dan rapor karakter (atau keistimewaan anak). Catatan kepribadian anak itu penting, termasuk catatan tentang bakat dan keunggulan anak yang tidak didapatkan di sekolah. Misalnya, di luar sekolah anaknya bisa berprestasi dalam bidang olah raga, seperti juara karate, juara bulu tangkis di kampung atau dalam turnamen lain. Di Papua ini, misalnya, anak-anak yang berbakat sepak bola, bakat menari dan menyanyi. Keunggulan atau keistimewaan ini layak untuk dicatat sebagai prestasi anak, yang perlu diberi penghargaan di sekolah.

Karena itu MBS harus dimaknai sebagai mekanisme dan ruang di mana kegiatan di luar sekolah pun diberi nilai sebagai proses belajar. Program LANDASAN turut meningkatkan tata kelola kampung, harapannya kampung pun bisa



Bapak MENDIKBUD Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP beserta rombongan, pengawas, Kepala Sekolah dan Staf Program KOMPAK LANDASAN
Foto : NJ. Tangkepayung/Yayasan BaKTI

memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar dan menemukan keistimewaan dirinya masing-masing di dalam ruang yang disediakan kampung dan rumah tangga. Sekolah bisa membangun hubungan yang erat dengan kampung untuk mendukung anak-anak untuk menemukan keistimewaan atau keunggulan di dalam dirinya.

Dalam penutup tanya jawab, Mendikbud memberikan apresiasi kepada Program LANDASAN yang telah membantu peningkatan tata kelola sekolah dan kapasitas kepala sekolah. Mendikbud juga mengapresiasi partisipasi warga kampung melalui komite sekolah dan

melalui dukungan lain untuk sekolah di wilayahnya masing-masing.

Kelanjutan dari kunjungan Mendikbud dan rombongan adalah dengan mengadakan pertemuan antara Perwakilan Dinas Pendidikan, Narasumber, Pengawas dan Tim LANDASAN yang didampingi oleh Bapak Dr. James Modouw (Staf Ahli Bidang Kerjasama Pusat dan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Pak James menyampaikan beberapa hal terkait dengan kunjungan Menteri, antara lain: "...menurut Pak Menteri bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Program KOMPAK LANDASAN bagus sekali dan sudah disampaikan ke Direktur SD untuk direplikasi ke daerah lain. Kita sudah berada pada jalan yang benar sehingga kita harus menyusun *exit strategy* yang baik terutama dalam hal perubahan yang terjadi...."

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program KOMPAK-LANDASAN II, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Literasi Untuk Kesejahteraan

Oleh **IRSAN**

Lembaga sosial dapat berperan dalam pengembangan perpustakaan umum. Salah satu lembaga yang secara khusus mendorong transformasi perpustakaan ialah Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI). Pengembangan perpustakaan yang digerakkan oleh CCFI telah diprogramkan sejak tahun 2000. Namun lebih fokus lagi setelah CCFI menjalin kerjasama dengan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) pada tahun 2011.

CCFI dan BMGF selanjutnya meluncurkan program yang diberi nama Perpustakaan Seru

(PerpuSeru) pada November 2011. Tujuan dari program PerpuSeru ini ialah menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang diharapkan memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada fase awal, PerpuSeru bermitra dengan 34 perpustakaan di 16 provinsi di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2018, program PerpuSeru telah bermitra dengan 104 perpustakaan kabupaten/kota dan 768



Foto: Gutriyana Chairan

perpustakaan desa/kelurahan/TBM (Taman Bacaan Masyarakat) yang tersebar di 18 Provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, program PerpuSeru telah melatih 2300 staf perpustakaan kabupaten/kota dan 1800 pengelola perpustakaan desa/kelurahan/TBM tentang strategi pengembangan perpustakaan. Melalui sumber daya manusia yang terlatih, perpustakaan telah mendorong peningkatan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja. Kehadiran PerpuSeru juga berhasil mentransformasi layanan perpustakaan yang sebelumnya berfokus pada layanan membaca, kini menjadi pusat informasi, belajar dan berkegiatan bagi masyarakat.

Melihat dampak yang dihasilkan, program PerpuSeru mendapatkan sambutan yang baik oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan menjadikan transformasi perpustakaan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Prioritas ini dianggap relevan dengan apa yang telah

dilakukan oleh program PerpuSeru selama ini. Untuk itu dihadirkan sebagai upaya percepatan pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan. Upaya tersebut dilakukan dengan menghadirkan literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Mengadopsi program tersebut, perpustakaan Nasional selanjutnya menyusun revitalisasi pengembangan perpustakaan umum melalui transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Konsep ini mendorong perpustakaan umum untuk melakukan penguatan pada fungsi vital perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dan memberdayakan masyarakat.

Pendekatan inklusi sosial dikembangkan sebagai bentuk pendekatan yang berbasis sistem sosial (*humanistic approach*). Hal ini menekankan bahwa perpustakaan merupakan bagian dari sistem sosial/kemasyarakatan yang diharapkan dapat memberikan kebermanfaat



Foto: Gutriyana Chairan

di lingkungannya. Melalui pendekatan inklusif pula, perpustakaan sebagai ruang publik yang terbuka dapat memberikan solusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Sebagai prioritas nasional, pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial kemudian menjadi tanggungjawab Perpustakaan Nasional RI. Pada tahun ini, 21 provinsi dan 60 kabupaten/kota penerima manfaat telah dilatih oleh *trainer* pada bulan oktober 2018. Para peserta yang berasal dari Perpustakaan Umum Kabupaten/kota pun telah mendapatkan gambaran dan tujuan dari konsep revitalisasi pengembangan perpustakaan umum. Peserta pun diberikan strategi transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang meliputi strategi pelibatan masyarakat (*community engagement*), peningkatan layanan Teknologi Informasi Komputer (TIK) perpustakaan, dan strategi advokasi pengembangan perpustakaan.

Setelah peserta mengikuti Bimtek Peningkatan Fasilitator Perpustakaan Umum, selanjutnya akan mengimplementasikan rencana kerja yang telah disusun. Tentunya rencana kerja tersebut merupakan strategi yang telah diberikan dalam upaya transformasi perpustakaan umum. Termasuk bagaimana

perpusatkan daerah (perpusda) membangun sinergi kepada para stakeholder dan komunitas untuk turut memfasilitasi masyarakat dengan berbagai pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Untuk tahun 2019, perpusda yang menunjukkan komitmennya dalam pengembangan perpustakaan, akan didorong untuk mereplikasi perpustakaan desa di kabupaten masing-masing. Karena itu perpusda diharapkan menjadi contoh dalam transformasi bagi perpustakaan desa.

Untuk wilayah Sulawesi, ada dua provinsi yang masuk dalam program revitalisasi perpustakaan yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Untuk provinsi Sulawesi Selatan meliputi kabupaten Maros, Bone dan Soppeng, sementara Sulawesi Tengah meliputi Banggai, Donggala dan Sigi. Masing-masing dari perpustakaan daerah tersebut diberikan stimulan untuk bergerak berupa perangkat komputer sebanyak 3 unit, server 1 unit, koleksi buku, aplikasi Inlislite dan Kunang-kunang, serta pelatihan peningkatan fasilitator.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Enrekang. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang PerpuSeru dapat menghubungi Gutriyana Chairan melalui email gutriyana@gmail.com



Kegiatan di BaKTI

11 November 2018

Workshop Teater Boneka

Rumah Dongeng bekerjasama dengan Rumata Artspace mengadakan Workshop Teater Boneka bersama Ria Papermoon dari Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 22 peserta workshop yang berasal dari berbagai profesi dan komunitas termasuk 2 peserta yang masih duduk di kelas 5 SD. Papermoon Puppet Theatre sendiri didirikan oleh Maria Tri Sulistyani (ilustrator, penulis, dan mantan pemain teater) dan Iwan Effendi (perupa). Berbasis di Yogyakarta, Papermoon menciptakan produksi campuran-media: sebuah drama teater melalui instalasi seni visual, yang imajinatif mengeksplorasi identitas dan masyarakat. Papermoon telah melakukan tur di seluruh dunia



dalam berbagai kesempatan, seperti *Hochschule fur Schauspielkunst* di Berlin Jerman 2014, *Darwin Festival* 2013 di Australia, *AIR Koganecho*, Yokohama di Jepang 2012, *ASEAN Puppetry Festival* 2012 dan turut serta dalam kegiatan MIWF di Makassar tahun 2016.

23 November 2018

Pertemuan Monitoring dan Evaluasi PKSAI Kota Makassar

UNICEF melalui Yayasan BaKTI mengadakan pertemuan monitoring dan evaluasi PKSAI dengan berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari Dinas dan instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur capaian pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Kota Makassar. PKSAI di Kota Makassar telah berjalan selama 2 tahun lebih. Monitoring dan evaluasi PKSAI diukur dengan menggunakan alat *monitoring scorecard* 6 komponen layanan dan *Most significant*

change (MSC). Pertemuan ini menghasilkan *Monitoring* dan Evaluasi *scorecard* 6 komponen Layanan PKSAI Kota Makassar dan tersusun 6 cerita perubahan signifikan yang terjadi sebagai pengaruh pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta berasal dari unsur Dinas Sosial Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi, Organisasi Perangkat Daerah di Kota Makassar antara lain Bappeda, Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dukcapil, RSUD Daya, Rumah Sakit Bhayangkara, Tim PKSAI, Sakti Peksos, Fasilitator SLRT dan PKH.

27 November 2018

Inspirasi BaKTI "Diskusi Buku : Panduan Jurnalis Berspektif Perempuan dan Anak"

Sebagai bagian dari rangkaian Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP), Yayasan BaKTI kembali menggelar acara Inspirasi BaKTI berupa Sosialisasi dan Diskusi Buku Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak. Panduan tersebut dibuat atas kerjasama Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)-Yayasan BaKTI dan AJI Makassar. Diskusi yang mengangkat tema "Peran Media untuk Pencegahan Perkawinan Anak" ini bertujuan untuk membuka wawasan bagi jurnalis dan berbagai pihak mengenai penulisan dan pemberitaan yang

berperspektif perempuan dan anak. Hadir sebagai narasumber adalah Qodriansyah Agam Sofyan (Ketua AJI Makassar/penulis panduan) dan Sunarti Sain (jurnalis/aktivis perempuan dan anak). Sunarti dalam paparannya mengatakan bahwa penting sekali jurnalis memiliki perspektif jender sehingga berita tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak menjadi bias dan terkesan lebih kepada eksploitasi media saja. Sedangkan Agam mengungkapkan alasan panduan ini lahir, karena ada pemberitaan jurnalistik di media cetak, elektronik, radio maupun televisi yang salah mengenai perempuan, anak, dan difabel. Dengan adanya panduan ini, jurnalis tidak hanya diharapkan menjadi jurnalis objektif tetapi juga advokatif. Diskusi Inspirasi BaKTI ini dihadiri oleh 77 orang peserta berasal dari kalangan media, pers kampus, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah dan program donor.



Mengembalikan Indonesia

PENULIS Ivan A. Hadar, dkk.

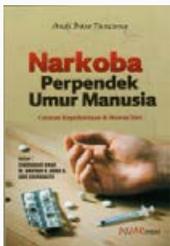
Para pendiri bangsa kita punya cita-cita yang mulia tentang Indonesia: negara yang berdaulat, demokratis, maju, adil, makmur, sejahtera dan setara dengan bangsa-bangsa beradab lainnya di dunia. Namun, silih bergantinya kekuasaan di tengah arus deras globalisasi dan modernisasi, Indonesia belum juga beranjak dari status negara berkembang dengan segudang masalah. Melalui buku ini, dengan latar belakang dan minat berbeda, para penulis menggoreskan kegelisahannya atas kondisi yang terjadi di Indonesia.



Syahrul Yasin Limpo: Gelombang Prestasi dari Pesisir Bahari

PENULIS Sulka S. Latief

Bagi siapa pun yang dekat dengan dunia kelautan dan perikanan, seharusnya tidak bisa tenang, selalu gelisah melihat potensi laut dan perikanan Sulawesi Selatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sama dengan masalah yang dihadapi di level nasional. Masalahnya bukan pada sumber daya alamnya. Kita tinggal di negeri yang memiliki potensi ikan yang luar biasa banyak. Buku ini menyajikan kebijakan-kebijakan mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, dalam menghadapi tantangan tersebut.



Narkoba Perpendek Umur Manusia; Catatan Keprihatinan dan Mawas Diri

PENULIS Andi Baso Tancung

Narkoba menjadi fenomena kehidupan di tengah masyarakat terutama pada generasi muda yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Setiap tahunnya terjadi peningkatan pada penyalahgunaan narkoba, dan memakan banyak korban jiwa. Buku ini memuat seluk beluk narkoba, peredarannya, dampak yang diakibatkan serta pencegahan agar tidak terjerumus ke dalamnya.



Bagaimana Anyss Naik Ke Langit?

PENULIS Faisal Tehrani

"Mengapa orang kita rasa menolong Palestina lebih bersyurga kalau Penan di halaman sendiri diperlakukan sebagai mangsa?" Itulah salah satu petikan dalam buku ini. Novel berbahasa melayu ini bercerita tentang Profesor Anyss dalam perjalanannya ke Beijing dan perjuangannya membela gadis-gadis Penan yang mengalami kekerasan seksual. Faisal juga mengangkat isu pembalakan hutan di Serawak, menambah serius masalah dalam novel ini.